

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2023



**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN
PERKEBUNAN (BBPPTP) SURABAYA
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya tahun 2023 dapat diselesaikan.

RKT BBPPTP Surabaya tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) BBPPTP Surabaya tahun 2020 – 2024. RKT ini dijadikan pedoman untuk melaksanakan program / kegiatan tahun 2023 dan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk dunia usaha dan masyarakat dalam menyusun program / kegiatan sebagai bentuk partisipasi pembangunan perkebunan. Selain itu RKT merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan BBPPTP Surabaya terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran strategisnya

Pencapaian target rencana program / kegiatan melalui serangkaian program / kegiatan prioritas yang termuat dalam RKT 2023, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh.

Dengan disusunnya RKT tahun 2023 ini diharapkan target dari sasaran strategis yang dijabarkan dalam beberapa indikator kinerja kegiatan BBPPTP Surabaya tahun 2023 dapat tercapai dengan tingkat keberhasilan yang tinggi.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga tersusun RKT tahun 2023 ini.

Jombang, Januari 2023

Kepala Balai,



Irfan Mullin Robert Sitanggang

NP. 196412281992031002

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Sasaran.....	2
1.4 Dasar Hukum.....	2
BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	4
2.1 Visi dan Misi	4
2.2 Tujuan dan Sasaran	4
2.3 Strategi.....	5
2.4 Kebijakan dan Program	7
BAB III PERENCANAAN KEGIATAN	8
3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023.....	8
3.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023	8
3.2.1. Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar.....	10
3.2.2. Penguatan Perlindungan Perkebuunan.....	11
3.2.3. Penguatan Perbenihan Perkebunan	13
3.2.4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	15
BAB IV PENUTUP	17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pertanian, khususnya pembangunan perkebunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman kepada Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan nasional dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat: 1) prioritas pembangunan, 2) rancangan kerangka ekonomi makro, 3) program Kementerian/Lembaga (K/L), dan 4) program lintas K/L dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan RPJM, setiap K/L menyusun Rencana Strategis (Renstra) K/L dan untuk program tahunan dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang secara tegas telah dinyatakan bahwa pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan menggunakan pendekatan anggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja.

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut diatas, BBPPTP Surabaya memandang perlu menyusun RKT tahun 2023 yang menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam tahun 2023. RKT ini merupakan dokumen yang mempresentasikan nilai kuantitatif dikaitkan dengan setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan proses pengukuran keberhasilan atau kegagalan BBPPTP Surabaya pada tahun

bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut maka penyiapan dan penyusunan rencana kinerja tahunan harus mengacu pada Renstra BBPPTP Surabaya periode 2020-2024.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKT tahun 2023 dimaksudkan sebagai acuan BBPPTP Surabaya dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BBPPTP Surabaya 2020-2024, dan sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan kegiatan dalam tahun 2023. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RKT adalah:

- a. Memberikan arah dalam pelaksanaan dan pencapaian target kegiatan
- b. Menyediakan alat pengukur / dasar penilaian kinerja
- c. Membantu dalam penetapan target kinerja, pemantauan dan evaluasi kinerja

1.3 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari RKT BBPPTP Surabaya tahun 2023 yaitu tercapainya target kinerja BBPPTP Surabaya tahun 2023 sesuai dengan Renstra BBPPTP Surabaya 2020 - 2024

1.4 Dasar Hukum

Dalam penyusunan RKT BBPPTP Surabaya tahun 2028, dasar hukum yang digunakan adalah:

- a. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- c. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- f. Permentan Nomor 42 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan
- g. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025
- h. Permentan Nomor 135 tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian
- i. Permenpan-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- j. Permenpan-RB Nomor 13 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.1 Visi dan Misi

Visi Balai Besar Perbenihan Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya adalah “Menjadi Balai yang Profesional dalam Melaksanakan Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Serta Pengembangan dan Penyiapan Teknologi Proteksi dalam Mewujudkan Perkebunan Indonesia yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya Saing”.

Sedangkan misi yang diemban BBPPTP Surabaya adalah :

- a. Mewujudkan pelaksanaan sertifikasi dan pengujian mutu benih serta pengawasan benih secara cepat, tepat dan akurat;
- b. Mewujudkan dukungan penyediaan benih tanaman perkebunan yang bermutu dan berkelanjutan melalui pengembangan dan tata kelola nursery tanaman perkebunan yang profesional;
- c. Mewujudkan dukungan perlindungan perkebunan melalui inovasi teknologi proteksi yang ramah lingkungan dalam mengatasi gangguan OPT dan gangguan usaha perkebunan serta pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida;
- d. Mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas sebagai implementasi reformasi birokrasi kepada masyarakat melalui pelayanan data dan informasi serta dukungan teknis lainnya dalam bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- e. Mewujudkan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga balai

2.2 Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari visi dan misi BBPPTP Surabaya, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

- a. Memberikan pelayanan sertifikasi dan pengujian mutu benih secara cepat, tepat dan akurat dalam mendukung penyediaan benih unggul, bermutu dan bersertifikat.

- b. Menyediakan benih perkebunan yang bermutu dan berkelanjutan kepada masyarakat pekebun
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis kebun sumber benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya
- d. Menyediakan teknologi perlindungan perkebunan yang ramah lingkungan dalam pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman serta penanganan gangguan usaha perkebunan
- e. Meningkatkan dan mengembangkan ketersediaan Agens Pengendali Hayati (APH) dan pupuk hayati.
- f. Memberikan pelayanan analisis mutu dan residu pestisida pada produk-produk perkebunan dengan memperhatikan isu-isu lingkungan.
- g. Meningkatkan mutu layanan data dan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan dengan menggunakan teknologi informasi kepada masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan.
- h. Melakukan upaya strategis dan bimbingan teknis sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan pengembangan jejaring kerjasama laboratorium.
- i. Memberikan pelayanan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga balai.
- j. Meningkatkan inovasi pelayanan public sebagai implementasi reformasi birokrasi

2.3 Strategi

Strategi yang dilakukan BBPPTP Surabaya untuk mendukung pembangunan perkebunan tahun 2020-2024 adalah strategi peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan yang merupakan salah satu strategi khusus dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Adapun usaha-usaha untuk melaksanakan strategi tersebut adalah :

- a. Memanfaatkan landasan hukum untuk meningkatkan partisipasi dan respon masyarakat dalam penggunaan benih unggul bermutu dan penerapan PHT
- b. Memanfaatkan kelembagaan yang ada untuk memberikan pelayanan prima

- c. Memanfaatkan SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi perbenihan dan proteksi
- d. Memanfaatkan teknologi dan informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pelayanan prima
- e. Mengoptimalkan penerapan pedoman dan standar dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan prima kepada masyarakat
- f. Memanfaatkan landasan hukum untuk mendukung implementasi SPS, BMR, dan peraturan internasional lainnya
- g. Memanfaatkan peran kelembagaan untuk meningkatkan kualitas SDM petani
- h. Mengoptimalkan SDM dalam memberikan pelayanan informai dan pelaporan yang akurat, cepat, dan terkini
- i. Memanfaatkan tersedianya teknologi dan informasi untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh kondisi geografis, agroekologis, dan perubahan iklim global
- j. Memanfaatkan dukungan partisipasi, respon masyarakat, dan peran serta dinas / UPTD untuk meningkatkan koordinasi dan pelayanan prima
- k. Memanfaatkan kebutuhan masyarakat akan informasi untuk peningkatan sistem informasi
- l. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung serta meningkatkan kompetensi SDM untuk memenuhi kebutuhan pelayanan prima kepada masyarakat
- m. Meningkatkan pelayanan untuk memberikan informasi yang akurat, cepat, dan terkini
- n. Meningkatkan koordinasi untuk mengatasi permasalahan kondisi geografis, agroekologis, dan perubahan iklim global
- o. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kualitas SDM petani
- p. Meningkatkan kompetensi SDM untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

2.4 Kebijakan dan Program

Dalam rangka mewujudkan rencana kegiatan balai maka kebijakan umum BBPPTP Surabaya diarahkan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan nasional 2020 - 2024 yaitu untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dengan 5 (lima) arah kebijakan berikut:

- a. Terjaganya ketahanan pangan nasional;
- b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian;
- c. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
- d. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian;
- e. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.

BBPPTP Surabaya menetapkan arah kebijakan tahun 2020 – 2024 sebagai dasar pelaksanaan strategi, program dan kegiatan BBPPTP Surabaya tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan pembangunan perkebunan 5 tahun mendatang ditetapkan menjadi arah kebijakan umum dan arah kebijakan khusus. Arah kebijakan umum BBPPTP Surabaya Tahun 2020 - 2024 adalah mendukung pengujian, pengawasan mutu benih dan mutu APH serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan untuk mendukung kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan. Implementasi dukungan BBPPTP Surabaya adalah:

- a. Sertifikasi dan pengujian mutu benih dan mutu APH;
- b. Pengembangan teknologi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan yang ramah lingkungan ;
- c. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Adapun program yang dilaksanakan BBPPTP Surabaya pada tahun 2023 adalah Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen yang merupakan hasil restrukturisasi program pembangunan perkebunan tahun 2020-2024. Program tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan. Sedangkan BBPPTP Surabaya sebagai eselon II hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatannya.

BAB III PERENCANAAN KEGIATAN

3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Dalam rangka mendukung terwujudnya program yang diemban oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, BBPPTP Surabaya memiliki indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2023. Target tersebut tercantum dalam Renstra Ditjen. Perkebunan 2020-2024. BBPPTP Surabaya memiliki 3 indikator kinerja yang mendukung 3 sasaran Direktur Jenderal Perkebunan. Secara rinci sasaran beserta indikator kinerja BBPPTP Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Matriks Rencana Kinerja BBPPTP Surabaya Tahun 2023

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target
Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi data dan informasi proteksi	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Surabaya	6 Layanan
Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBPPTP Surabaya	6 Layanan
Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap layanan BBPPTP Surabaya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan BBPPTP Surabaya	3 Skala Likert (1-4)

3.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBPPTP Surabaya Nomor : SP DIPA-018.05.2.567338/2023 REV. 1 Tanggal 27 Desember 2022, alokasi anggaran BBPPTP Surabaya pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 90.430.616.000. Anggaran yang dimiliki oleh BBPPTP Surabaya kemudian dibagi ke dalam dua program yaitu Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan program Dukungan Manajemen. Proporsi anggaran masing-masing program dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Alokasi Anggaran per Program Tahun 2023

No	Program	Anggaran
1	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	73.572.900.000
2	Dukungan Manajemen	16.857.716.000
JUMLAH		90.430.616.000

Program di atas kemudian dijabarkan kembali dalam bentuk kegiatan. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri memiliki 3 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar
2. Penguatan Perlindungan Perkebunan
3. Penguatan Perbenihan Perkebunan

Kemudian untuk program Dukungan Manajemen hanya memiliki 1 kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan. Pada tahun 2023 selain melaksanakan tugas dan fungsi, BBPPTP Surabaya juga mendapatkan tugas tambahan untuk melakukan penyaluran benih melalui Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar (1777). Alokasi anggaran terbesar terdapat pada kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar yaitu sebesar 48,15% atau setara dengan Rp 43.538.025.000. Kegiatan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas dan fungsi BBPPTP Surabaya, dimana kegiatannya berupa penyaluran benih dan sarana produksi lainnya kepada petani/pekebun.

Tabel 3.3 Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Anggaran
1	Belanja Pegawai	10.834.910.00
2	Belanja Modal	1.641.450.000
3	Belanja Barang	77.754.256.000
JUMLAH		90.430.616.000

Jika dilihat dari jenis belanja, anggaran BBPPTP Surabaya dapat dibagi menjadi 3 Seperti tabel di atas. Alokasi anggaran terbesar berada pada belanja barang yaitu sebesar 85,98% dari total anggaran BBPPTP Surabaya. Belanja barang

ini meliputi perjalanan dinas, bantuan sarana produksi kepada petani/pekebun, kebutuhan kantor, bahan lab dan lain-lain. Kemudian untuk belanja pegawai meliputi belanja gaji PNS beserta tunjangan yang melekat lainnya.

3.2.1. Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Subsektor perkebunan masih banyak didominasi oleh perkebunan rakyat kecuali untuk komoditas kelapa sawit, sehingga peranan pemerintah sangat penting dalam keberlanjutan pengembangan komoditi perkebunan lainnya. Melalui kegiatan pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar, pemerintah memberikan bantuan kepada petani/pekebun berupa benih atau sarana produksi lainnya seperti pupuk. Dengan adanya bantuan dari pemerintah diharapkan bisa menjadi stimulan untuk pengembangan komoditi lainnya. Pada tahun 2023 BBPPTP surabaya mendapat alokasi anggaran untuk pengembangan 4 komoditi yaitu kopi, kakao, kelapa dan jambu mete. Alokasi anggaran untuk masing-masing komoditas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Alokasi Anggaran Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar per Rincian Output (RO)

Kode RO	Rincian Output	Volume	Satuan	Anggaran
1777.RAI.001	Kawasan Kopi	1.100	Ha	14.749.000.000
1777.RAI.002	Kawasan Kakao	2.900	Ha	14.940.000.000
1777.RAI.005	Kawasan Kelapa	2.200	Ha	12.306.200.000
1777.RAI.007	Kawasan Jambu Mete	450	Ha	1.542.825.000
JUMLAH				43.538.025.000

Keempat komoditas di atas masuk dalam Prioritas Nasional (PN), sehingga banyak mendapat perhatian dari pemerintah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar dibagi ke dalam beberapa komponen / jenis intervensi kegiatan. Intervensi kegiatan tersebut disesuaikan dengan kondisi tanaman pada Calon Petani Calon Lahan (CPCL) yang akan menerima bantuan. Hal ini dilakukan agar bantuan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan petani. Penjabaran kegiatan pengembangan

kawasan tanaman tahunan dan penyegar hingga level komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Struktur Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Kode KRO	Kode RO	Kode Komponen	Uraian
RAI			Sarana Pengembangan Kawasan
	001		Kawasan Kopi
		051	Perluasan Tanaman Kopi
		052	Peremajaan Tanaman Kopi
		054	Intensifikasi Tanaman Kopi
		055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan
	002		Kawasan Kakao
		052	Peremajaan Tanaman Kakao
		054	Intensifikasi Tanaman Kakao
		055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan
	005		Kawasan Kelapa
		051	Perluasan Tanaman Kelapa
		052	Peremajaan Tanaman Kelapa
		055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan
	007		Kawasan Jambu Mete
		052	Peremajaan Tanaman Jambu Mete
		055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan

3.2.2. Penguatan Perlindungan Perkebunan

Pengembangan kawasan tanaman perkebunan harus diikuti dengan kegiatan penguatan perlindungan, hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman perkebunan yang diakibatkan oleh faktor biotik dan abiotik. Kerugian yang disebabkan oleh faktor biotik adalah akibat adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) sedangkan kerugian yang disebabkan faktor abiotik antara lain adalah akibat Dampak Perubahan Iklim (DPI) berupa pemanasan global dan kebakaran lahan. Minimnya kesadaran petani untuk menjaga tanaman dari serangan OPT menjadi tantangan besar bagi pemerintah, sehingga perlu dilakukan sosialisasi ataupun kegiatan lainnya untuk menumbuhkan kesadaran petani. Pada tahun 2023 BBPPTP Surabaya mendapatkan anggaran untuk kegiatan penguatan perlindungan sebesar Rp 5.394.314.000. Anggaran tersebut kemudian dijabarkan

ke dalam 6 rincian Output. Target dan anggaran pada masing-masing RO dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6 Alokasi Anggaran Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan per Rincian Output (RO)

Kode RO	Rincian Output	Volume	Satuan	Anggaran
1779.ABR.001	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	4	Rekomendasi Teknologi	1.180.000.000
1779.CAG.001	Perangkat Perlindungan Perkebunan	1	Unit	49.700.000
1779.CAG.002	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	2	Paket Teknologi	1.085.320.000
1779.PDC.001	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	3	Desa	395.100.000
1779.RAI.001	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	60	Ha	583.175.000
1779.RAI.002	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	100	Ha	2.101.019.000
JUMLAH				5.394.314.000

Dalam pelaksanaan kegiatan penguatan perlindungan perkebunan di lapangan 6 RO di atas kemudian dijabarkan menjadi 11 komponen. Pada Tahun 2023 terdapat komponen yang baru yaitu Sertifikasi *Climate Friendly Farming*. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kesadaran petani untuk menjaga tanaman dari serangan OPT serta dampak dari perubahan iklim. Penjabaran kegiatann penguatan perlindungan perkebunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7 Struktur Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan

Kode KRO	Kode RO	Kode Komponen	Uraian
ABR			Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
	001		Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan
		051	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan
CAG			Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	001		Perangkat Perlindungan Perkebunan
		054	Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan
	002		Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan
		051	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan
PDC			Sertifikasi Produk
	001		Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan
		051	Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan
		052	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan
RAI			Sarana Pengembangan Kawasan
	001		Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun
		051	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		054	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan
		055	Sertifikasi Climate Friendly Farming
			Sarana Pengembangan Kawasan
	002		Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan
		051	Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar
		052	Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah
		053	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan

3.2.3. Penguatan Perbenihan Perkebunan

Tanaman perkebunan banyak didominasi tanaman yang bersifat tahunan dan musiman. Waktu yang dibutuhkan dari awal menanam hingga produksi

membutuhkan waktu lebih dari satu tahun (kecuali tanaman semuism). Oleh karena itu, benih menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pengembangan kawasan tanaman perkebunan. Benih yang bermutu dan berkualitas akan meminimalisir adanya kerugian di masa mendatang, dimana tanaman yang sudah ditanam dapat berproduksi dengan baik. Total anggaran penguatan perbenihan perkebunan BBPPTP Surabaya pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 24.640.561.000. Anggaran tersebut kemudian dibagi ke dalam 3 Rincian Output seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.8 Alokasi Anggaran Kegiatan Penguatan Perbenihan Perkebunan per Rincian Output

Kode RO	Rincian Output	Volume	Satuan	Anggaran
5890.BJA.001	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	11.159.600	Batang	1.105.468.000
5890.BJA.002	Pengujian Mutu Benih	7.439.740	Batang	611.000.000
5890.RBK.001	Nursery	12	Unit	22.924.093.000
JUMLAH				24.640.561.000

Alokasi anggaran terbesar pada kegiatan penguatan perbenihan perkebunan terletak pada RO Nursery. Mengingat pentingnya benih yang berkualitas dan bermutu dalam pengembangan kawasan tanaman perkebunan, diharapkan dengan adanya nursery ini bisa menjamin keaslian benih yang akan ditanam. Selain berusaha menyediakan benih yang berkualitas, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap peredaran benih yang ada serta melakukan pengujian mutu benih untuk memastikan tidak ada benih palsu yang beredar di petani. Kegiatan penguatan perlindungan secara rinci dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3-9 Struktur Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Kode KRO	Kode RO	Kode Komponen	Uraian
BJA			Penyidikan dan Pengujian Produk
	001		Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan
		051	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan
	002		Pengujian Mutu Benih
		051	Pengujian Mutu Benih

Kode KRO	Kode RO	Kode Komponen	Uraian
RBK			Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	001		Nursery
		051	Pembangunan Nursery
		052	Operasional Nursery
		053	Produksi Benih

3.2.4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

Kegiatan yang tidak kalah penting yaitu Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan, karena memuat kegiatan yang mendukung terlaksannaya kegiatan yang lain. Komponen utama dalam kegiatan ini yaitu gaji dan tunjangan pegawai serta operasional pemeliharaan aset-aset yang dimiliki oleh kantor. Total RO yang ada pada kegiatan dukungan manajemen ini yaitu 7 RO. Penjabaran RO beserta target dan anggarannya secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10 Alokasi Anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan per Rincian Output

Kode RO	Rincian Output	Volume	Satuan	Anggaran
1780.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan	273.300.000
1780.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	1.513.512.000
1780.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	13.677.164.000
1780.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	149	Orang	408.200.000
1780.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Dokumen	584.140.000
1780.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dokumen	221.400.000
1780.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen	180.000.000
JUMLAH				24.640.561.000

Kegiatan dukungan manajemen juga dijabarkan menjadi 8 komponen. Penjabaran Struktur kegiatan dukungan manajemen dari KRO hingga level komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.11 Struktur Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

Kode KRO	Kode RO	Kode Komponen	Uraian
EBA			Layanan Dukungan Manajemen Internal
	956		Layanan BMN
		052	Pengelolaan Barang Milik UPT Pusat
	962		Layanan Umum
		052	Pelayanan Umum UPT Pusat
	994		Layanan Perkantoran
		001	Gaji dan Tunjangan
		002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
EBC			Layanan Manajemen SDM Internal
	954		Layanan Manajemen SDM
		052	Pengelolaan Kepegawaian UPT Pusat
EBD			Layanan Manajemen Kinerja Internal
	952		Layanan Perencanaan dan Penganggaran
		053	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran UPT Pusat
	953		Layanan Pemantauan dan Evaluasi
		052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi UPT Pusat
	955		Layanan Manajemen Keuangan
		052	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan UPT Pusat

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya tahun 2023 merupakan salah satu dokumen yang diperlukan dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang nantinya akan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN).

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 maka rencana kegiatan BBPPTP Surabaya dijabarkan ke dalam bentuk RKT tahun 2023 yang memuat sasaran, indikator kinerja serta target kegiatan BBPPTP Surabaya yang dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang telah ditentukan dalam RKT ini berupa output yang dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja.